

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ratogesa Kecamatan Golewa Tengah Kabupaten Ngada dapat diambil beberapa kesimpulan. **Perencanaan** program Dana Desa di Desa Ratogesa telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabel. **Pelaksanaan** program Dana Desa di Desa Ratogesa telah menerapkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel. **Pengawasan** oleh Pemerintah Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa di desa Ratogesa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. **Pertanggungjawaban** pengelolaan Dana Desa di Desa Ratogesa sudah baik secara teknis maupun administrasi dan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ratogesa, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini.

1. Bagi pemerintah desa.
 - a. Melakukan perbaikan secara terus menerus dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik.

- b. Pembinaan pengelola Dana Desa merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program Dana Desa, oleh karena itu pemahaman prinsip transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif kepada Aparat Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
 - c. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ratogesa yang telah di implementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Sebaiknya lebih mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan dalam wawancara.
 - b. Memperbanyak informan, terutama masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Winarno. 2014. *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus Edisi Revisi*. Yogyakarta CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- Chabib, Soleh. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Deddy, Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Pulik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Djudju, sudjana. 2006. *Evaluasi program pendidikan luar sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dunn, William N, 1998. *Pengantar analisis kebijakan publik, edisi kedua*, Yogyakarta, gajah mada university press.
- H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian kualitatif* (Dasar Teori Dan Penerapannya Falam Penelitian). Surakarta: Sebelas Maret University Press).

Widodo, Joko. 2008. *Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Banyumedia Publishing.

Leo, Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta

Nawawi, Hadari.1995. *Metode Penelitian Survei*, jakarta: LP3S

Suharsimi, Arikunto. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
jakarta: UGM Press.

Singarimbun, M. 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3S

Suharsimi, Arikunto.1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta: Rineke Cipta.

<http://bpk.ri.go.id/index.php>. mengkaji dana desa. diakses.: selasa 11 april 2017.

<http://www.koranjakarta.co.id/hg/eko.html>, Pemerataan Dan Kesenjangan.
Diakses: Sabtu 30 April 2017. b

<http://kemenkeu.ri.go.id/index.php>. Paparan Kementerian Keuangan Tentang
Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2016.
Diakses Selasa 11 April 2017.

<http://kemendesari.go.id/imdeks.php> Workop Pengkajian Pokok-Pokok Kebijakan
Prioritas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dana
Belanja Negara. <http://www.pdf-convert.com>.Diakses Jumat 31 Maret
2017.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang
Tatacara Pngalokasian, Penyaluran Penggunaan, Dan Evaluasi Dana Desa.
[Http://Www.Pdf-Convert.Com](http://www.pdf-convert.com). Diaksa Jumat 31 Maret 2017

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa.

<http://www.pdf-convert.com/diaksa> jumat 31 Maret 2017

Penggunaan dana desa tahun 2016. Direktorat jendral pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Diakses jumat 14 April 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa. <Http://www.pdf-convert.com>. Di akses: jumat 31 Maret 2017.

Somborarak, Apriliana. 2014. Evaluasi Program Alokasi Dana Desa Di Desa Loa
Janan Unu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Karta Negara. Jurna
Ilmu Pemerintah. Vol.2 no. 2. Diakses dari ejournal.Ip.fisip-unmul.ac.id.

Saputri, Meiga, Afrizal, Bismar Ariyanto. 2016. Evaluasi Penggunaan Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahun 2014 Di Desa Lancang Kuning Kecamatan
Bintan Utara.

Istifasudizhudin, Alifhazmi. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana
Desa Di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
Vol. diakses dari [http://download-fullpaper29e965full\(1\).pdf](http://download-fullpaper29e965full(1).pdf).